

BAB IV

STRATEGI TURKI DALAM MENANGGAPI DESTABILISASI YANG DILAKUKAN OLEH PKK

Bab ini merupakan bab ekplanasi yang rinci dan komprehensif atas topik yang diajukan dalam skripsi yang berjudul **Upaya Turki dalam Meredam Destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan pada Era Pemerintahan Recip Tayyip Erdogan**. Penulis akan memberikan analisa-analisa mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta membuktikan hipotesis dalam skripsi ini dengan menggunakan Konsep tunggal yakni “Operasi Militer” yang dikemukakan oleh Colin S. Grey.

Konsep ini merupakan salah satu bagian dari disiplin Colin yakni strategi, selain konflik dan perang. Dalam aplikasinya, konsep ini akan membantu menganalisis dan menjelaskan upaya atau langkah konkret seperti apa yang ditempuh oleh Turki dibawah kepemimpinan Erdogan guna merespon destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan. Eksplanasi substansial terkait keputusan Turki tersebut juga akan menjadi sajian dalam pembahasan bab ini.

Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan dari kebijaksanaan operasi militer tersebut untuk menanggapi PKK. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKK adalah bentuk persistensi atas tekad mereka untuk merdeka yang telah digaungkan sejak begitu lama. Perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh PKK dalam merespon konflik telah menjadi sebuah ukuran dinamis yang mengharuskan Turki untuk juga mengambil langkah yang tepat dan

sesuai agar tujuan dan keinginannya dapat tercapai secara optimal.

A. Mobilisasi Armada Militer Turki

Tindakan teror PKK kepada Turki seakan telah menjadi persoalan klasik dan berakar. Bagaimana kemudian rentetan serangan diarahkan secara membabi buta kepada masyarakat sipil hingga fasilitas umum dan vital dengan rentang waktu mencapai 3 dekade atau kurang lebih sekitar 33 tahun sejak perlawanan PKK dimulai. Hal ini tercatat sebagai salah satu perjuangan etnis tanpa negara atau *stateless* terpanjang dalam era negara modern serta menjadi kontribusi bagi sejarah kelam perjalanan Negara Turki. Kegelisahan PKK untuk memperoleh kemerdekaan telah membutuhkan nurani mereka untuk melihat dampak buruk dari kreasi teror yang mereka ciptakan.

Dalam *statusquo*, PKK bukan hanya menjadi batu sandungan bagi mulusnya modernisasi Turki tetapi juga menjadi oposisi yang vokal dan konsisten kontra terhadap kebijakan sekularisme modern yang dimulai sejak era Mustafa Kemal Atatürk. Persistensi dan keteguhan untuk mendirikan Negara Kurdistan seakan tidak pernah goyah dimulai kala gerakan ini terbentuk hingga kini di masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Sekalipun bukan merupakan kekuatan mayor jika dibandingkan dengan Turki dan Turki juga bukanlah lawan yang mudah untuk didikte agar memberikan keleluasaan bagi etnis Kurdi dalam mencapai tujuan pendirian Negara sosialis Kurdistan, namun PKK telah menjadi soroton yang diwaspadai dan terus diawasi.

Lewat sudut pandang lain, sebagai pemimpin yang melanjutkan tampuk kekuasaan Turki, secara eksplisit konflik PKK menjadi warisan kepada Erdogan. Harapan besar yang dipikulnya adalah agar mampu

melahirkan kebijakan-kebijakan solutif dalam menyelesaikan konflik atau setidaknya adalah pengambilan sikap yang tepat ditengah konflik, terlepas dari bagaimana skenario akhir konflik berjalan, entah dengan menghasilkan kemenangan salah satu pihak atautkah dengan perdamaian antar kedua belah pihak.

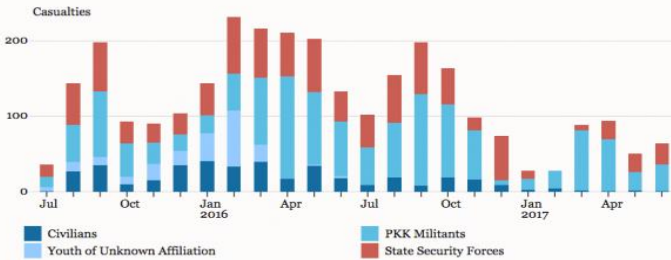
Harapan terlihat positif dengan mengamati perkembangan kondisi dan situasi konflik awal. Pendekatan-pendekatan persuasif yang lebih manusiawi awalnya berjalan dengan baik serta progresif. Komunikasi internsif, perundingan serta tawar menawar yang semuanya politis ditempuh dan diimplementasikan. Kendati pun begitu hasilnya tetaplah nihil, harapan hancur karena PKK tidak kooperatif dan tidak konsisten atas perjanjian awal. Dua kali kesepakatan gencatan senjata begitu prematur untuk menjadi penyimpul akhir konflik. Komunikasi terkait proses perdamaian yang ditempuh berakhir kosong karena egosentrisme yang pekat membentuk PKK menjadi ekstrimis bertekad bulat untuk kembali terlibat kontak senjata dengan Turki dan merasa hanya jalan ini yang dapat ditempuh.

Dalam kondisi yang terus terhimpit dan dengan idelisme sebuah negara yang harus melindungi masyarakatnya Turki wajib mengambil langkah cepat dan tegas karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kondisinya sama dengan membiarkan titik-titik sentral negara akan hancur digempur.

Masyarakat yang turun kejalan dan melakukan demonstrasi meminta Erdogan menindak tegas semua milisi PKK dan siapapun yang memiliki afiliasi dengan gerakan radikal sayap kiri tersebut. Hal itu juga dengan menimbang kerusakan materil dan jatuhnya korban, khususnya di wilayah Tenggara. Argumen tersebut diperkuat dengan rilis *Crisis Group*, sejak 2016 sekitar 90% dari semua korban yang jatuh terjadi distrik-distrik

Tenggara Turki. Hal ini membuat Turki berada dalam situasi krisis.

Gambar 4.1 Korban Konflik PKK-Kurdi
Casualties of the Conflict



Sumber : Turkey's PKK Conflict kill almost 3,000 in 2 years, Crisis Group⁴⁵

Seakan menjawab kekusaran rakyat, Erdogan yang secara personal merasa telah dipermainkan oleh PKK juga melihat tindakan destabilisasi dari sudut pandang sebagai yang dirugikan, persis seperti masyarakat Turki lainnya. Ini berarti respon sigap atas konflik harus segera direalisasikan, agar setidaknya mampu membalikan keadaan, melawan Partiya Karkeren Kurdistan.

Keputusan memulai operasi militer pun menjadi kebijakan yang dipilih Erdogan untuk meredam destabilisasi PKK.

⁴⁵ Crisis Group, Turkey : Turkeys PKK Conflict Kills almost 3000 two years, diakses dari <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-kills-almost-3000-two-years> diakses pada 7 desember 2017

"....we will never allow the establishment of a terror state along our borders. every necessary measure will be taken to counter the threat...."

Kutipan tersebut merupakan pernyataan dari Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang secara jelas menyatakan bahwa akan memerangi segala bentuk teror yang mencoba masuk dalam batas wilayah kekuasaannya. Melihat kondisi teror keji yang memberikan dampak sangat buruk bagi Turki membuat Erdogan percaya bahwa segala cara harus dilakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Bagaimana kemudian stabilitas kawasan menjadi hal yang sangat penting baginya. Ia pun menempuh upaya-upaya penggunaan dan mobilisasi kekuatan militer.

Turki dalam era Erdogan memang seringkali menggunakan kekuatan militer berkaitan dengan upaya menjaga keamanan negara, salah satunya dengan melakukan "*serious operation*" yang mana merupakan gagasan atau istilah yang dikemukakan oleh Recep Tayyip Erdogan merujuk pada respon cepat yang dibutuhkan pada kasus-kasus yang tengah terjadi dan melibatkan Turki didalamnya. Salah satunya adalah terkait penanganan Partai Karkeren Kurdistan.

Operasi ini pernah dilakukan sebanyak dua kali yakni pada Juli 2015 dan Desember 2016. Namun operasi ini berbeda dengan operasi militer yang nantinya dilakukan oleh Turki. Perbedaanya terletak pada jumlah personel yang diturunkan hanya personel khusus dan tidak dalam jumlah banyak namun memang upaya penanganannya tersebut masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk memberikan dampak kehancuran yang lebih buruk lagi pada PKK.

Untuk itu secara resmi Operasi Militer pertama dimulai sejak Maret 2017. Operasi militer ini disebut sebagai "*ADSD Military Operations*" atau *Area Denial*. Hal ini

merujuk pada taktik dan prosedur operasi militer yang digunakan yakni melalui mobilisasi militer kemudian menargetkan musuh atau sasaran operasi selanjutnya adalah menangkap, melukai atau membunuh, namun dalam operasi ini tentara Turki memprioritaskan dengan melakukan pembunuhan secara langsung, langkah ini merupakan langkah preventif untuk menghindari adanya serangan balasan dari musuh yang ditargetkan dan tahap akhir adalah netralisasi area atau memastikan bahwa daerah yang sebelumnya terdapat milisi PKK telah benar-benar steril.

Operasi militer ini memiliki 2 tujuan utama, yakni yang pertama adalah mengembalikan stabilitas Turki seperti sedia kala baik sosial budaya, politik maupun ekonomi yang terguncang karena berbagai serangan dan teror dan yang kedua adalah menetralisasi daerah-daerah konflik yang sebelumnya dikuasai oleh PKK. Kondisi yang memprihatinkan yang terjadi disudut-sudut negara khususnya tenggara Turki diharapkan mampu diselesaikan dengan operasi militer ASDS ini.

Operasi militer yang kini genap berumur 9 bulan tersebut telah berhasil menetralisasi lebih dari sekitar 10.500 milisi Partiya Karkeren Kurdistan. Operasi ini dilakukan secara regular dengan menargetkan wilayah-wilayah Tenggara Turki yang dianggap konfliktual dan menjadi sarang perkembangan taktik PKK, yakni Provinsi Hakkari, Sirnak, Mardin dan Diyabakir, daerah-daerah tersebut tercatat sebagai daerah paling rawan serangan PKK. PKK sendiri dalam melaksanakan serangan terkenal dengan taktik winter-summer. Taktik ini merupakan taktik klasik yang dikemukakan oleh Ocallyan yang berarti 2 hal. Pertama winter-summer berkaitan dengan sistem serangan atau teror yang dilakukan oleh PKK yakni secara beruntun dimana winter adalah serangan pertama dan summer berarti

serangan selanjutnya, ataupun yang kedua yakni merujuk pada masa atau musim serangan yakni pada masa musim dingin atau winter digunakan untuk memperluas wilayah dan daerah kekuasaan dengan melakukan persebaran keluar wilayah Turki dan summer digunakan untuk memperluas wilayah ke dalam dataran Turki. Taktik ini bukanlah barang baru bagi militer Turki, sehingga ASDS yang dianggap efektif dan efisien diterapkan.

ADSD sendiri sebenarnya merupakan taktik militer yang telah digunakan sejak 2007, namun kala itu taktik tersebut hanya dijalankan oleh pasukan militer khusus yang dianggap memiliki kemampuan lebih, dan kini seluruh anggota militer Turki yang dilibatkan dalam operasi militer diharuskan menguasai ASDS dengan baik. Hal ini juga buah kesepakatan antara Irak, Iran dan Turki yang mengadakan latihan militer bersama di Kandil guna mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme dan separatisme Kurdi. Turki juga memberikan akses pada Amerika Serikat untuk mengakses landasan pacu di Turki untuk kepentingan perlawanan terhadap PKK, hal ini berdasar pada fokus Negara Paman Sam yang juga melabeli PKK sebagai organisasi teroris internasional.

Dalam operasi militer ini Turki mengerahkan lebih dari 7000 tentara, pasukan khusus, polisi dan para *village guard*. *Village Guard* atau dalam bahasa Turki disebut *Korucular* adalah paramiliter atau masyarakat sipil yang secara sukarela dan sementara direkrut serta dilatih semi militer untuk dijadikan sebagai bagian dari sistem keamanan, seperti dalam operasi militer ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari Kurds, Circassian, Uzbek, Kyrgys dan juga Turk. Mereka dipersanjatai dan didanai oleh pemerintah Turki.

Pada akhirnya karena kekuatan militer yang mumpuni Turki mampu menunjukkan taji kekuatan militernya dan memberikan dampak destruktif parah

pada PKK. Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik mengatakan bahwa sejak 35 tahun lamanya berkonflik, mulai dari menempuh *serious operation* hingga *ASDA Military Operations* militer Turki telah berhasil menetralisasi 88% dari seluruh keanggotaan PKK dan operasi militer ini telah berhasil mengambil peran dan bagian yang sangat strategis dalam melemahkan peran PKK. Operasi militer ini bukan hanya mampu melumpuhkan dan membunuh PKK tetapi juga meningkatkan eksistensi kekuatan militer Turki dimata dunia, dimana menjadi salah satu negara dengan militer terkuat didunia.

Dalam eksekusinya operasi militer yang dijalankan oleh Turki meliputi 2 wilayah mayor, yakni serangan darat dan serangan udara. Keduanya menjadi pilihan utama karena faktor kondisi geografis wilayah PKK dan Negara Sosialis Kurdistan yang diharapkan adalah *lanlocked* atau terkepung daratan. Perbatasan-perbatasan antara Turki dengan negara-negara lain juga menjadi pertimbangan pemilihan jalur ini agar mempermudah komunikasi dan monitoring terhadap aktivitas PKK.

Melalui serangan darat, Turki merupakan salah satu negara dengan angkatan udara terbaik di dunia. Angkatan udara Turki dipertimbangkan istimewa karena memiliki kemampuan ganda baik sebagai armada dalam mode serang sekaligus *vice versa*. Kekuatan udara Turki juga menjadi salah satu yang berkembang paling pesat disamping Amerika Serikat dan Rusia.

Perkembangan militer ini tidak lepas dari peran serta dan tangan dingin Erdogan dalam meramu komposisi dan kebutuhan militer, khususnya pasukan udara. Turki tercatat memiliki 207 pesawat tempur, 207 pesawat serang, 439 transpotasi udara kemiliteran, serta 70 helikopter tempur dengan total 1.108 pesawat siap

kombat. Hal ini karena anggaran dan suplai dana militer yang juga besar yakni \$1.670.000.000.

Dengan kekuatan angkatan udara yang begitu proporsional tentu membuat Turki menjadi begitu superior. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2015 sejak Turki memulai serangan udara pada PKK. Pasca operasi militer resmi dijalankan, Turki menjadi semakin aktif melakukan gempuran udara berturut-turut pada kamp-kamp pengungsi, tempat singgah, gua-gua dan daerah-daerah yang dianggap berhubungan dan dijadikan sebagai markas PKK di Turki Tenggara. Selain itu pesawat tempur Turki juga membombardir wilayah Sidekan, Mergarash, Barmiza, Chinaroke, Galiye resh, Kareshk, Kiware dan Khwakurk.

Tensi konflik antar keduanya memuncak pasca bom kembar yang terjadi di Ankara yang menewaskan 95 orang dan menjadi teror bom paling mematikan di Turki dalam satu kali serangan. Awalnya diyakini bahwa ini merupakan serangan teror yang dilakukan oleh ISIS namun ternyata PKK adalah dalang dari peristiwa yang akan menjadi memori pahit masyarakat Turki tersebut.

Erdogan yang geram melihat kondisi instabil karena PKK kemudian menyerukan pergerakan armada militer secara massal. Gagasan ini merupakan kampanye kontra terorisme menyikapi PKK dengan tindakan-tindakan koersif yang dirasa tepat dan solutif. Serangan Udara sendiri dipilih dengan alasan keterbatasan persenjataan PKK yang hanya ada di darat sehingga memungkinkan Turki untuk dapat memberikan dampak kehancuran yang jauh lebih besar.

Selain sukses melalui jalur udara, Turki juga sukses menggunakan jalur darat dalam Operasi Militer. Serangan-serangan jalur darat Turki dapat dikatakan

menjadi yang paling efektif, hal ini karena jumlah anggota PKK yang dapat dinetralisasi juga jauh lebih banyak. Selain itu jalur darat dianggap lebih baik karena banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh para tentara Turki, sekalipun sering terlibat dalam kontak senjata langsung dan menewaskan salah satu atau kedua belah pihak, tetapi dengan operasi militer ini.

Sama halnya dengan gelontoran dana besar Turki pada angkatan udara, angkatan darat juga tumbuh dengan postur yang tidak main-main Turki memiliki 2445 unit Tank, 7550 kendaraan tempur bersenjata, 1013 Self-Propelled Artillery, 697 Towed Artillery dan 811. Selain serangan udara, serangan-serangan darat juga digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan dari PKK dan dengan tujuan menunjukkan kekuatan militer dari Turki. Hal ini menunjukkan betapa siapnya kondisi militer Turki untuk merespon rangkaian destabilisasi yang dilakukan oleh PKK. Lebih lanjut, Sesuai kajian Colin bahwa dalam sebuah operasi militer terdapat 4 faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan operasi militer itu sendiri, faktor tersebut adalah :

1. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah berdaulat
2. Kekuatan Militer mendapat suplai
3. Memiliki sistem persenjataan mumpuni dan peralatan militer yang cukup baik
4. Tentara yang siap berperang

Masing-masing faktor menjadi instrumen-instrumen mayor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki kontribusi yang sangat penting sehingga menopang jalannya sebuah operasi militer.

1. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Berdaulat

Sejak awal konflik bergulir, friksi yang terjadi antara Turki dan PKK telah menyita atensi begitu banyak pihak. Keteguhan untuk menyatakan dan mendeklarasikan kemerdekaan dinyatakan dalam tindakan-tindakan amoral dan ekstrimis. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk unjuk gigi dan unjuk aksi tetapi sebagai bukti bahwa Turki sedang dalam ancaman dan tidak baik-baik saja.

Tindakan ekstrim yang dilakukan oleh PKK tentu membuat seluruh warga Turki cemas dan berharap tidak menjadi korban atas berbagai tindakan teror tersebut. Dilain sisi PKK juga semakin brutal karena kekuatan dan jumlah mereka yang terus bertumbuh sejalan dengan jumlah etnis Kurdi yang ikut bangkit nasionalismenya.

Ditengah situasi yang makin pelik, sejak 2015 masyarakat Turki secara masal turun kejalan untuk melakukan aksi demonstrasi dan menuntut pemerintah segera menuntaskan masalah Partiya Karkaren Kurdistan. Istanbul dan Ankara sebagai dua kota sentral di Turki menjadi pusat demonstrasi. Desakan ini dilayangkan oleh masyarakat karena menilai setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin Turki bukan malah melemahkan PKK, tetapi justru menguatkan posisinya dalam percaturan sosial, politik dan negara.

Tuntutan ini semakin berdasar karena semakin banyak pejabat pemerintahan dan politisi pro Kurdi yang mulai membelot, tidak lagi mendukung kedaulatan Republik Turki tetapi justru berharap bisa mendorong terciptanya Negara Sosialis Kurdistan lewat cara-cara politis.

Tuntutan bukan hanya muncul dari elemen masyarakat, tetapi juga dari tubuh pemerintah dibawah Erdogan khususnya para politisi dan pejabat dari AKP. Mereka juga mendesak agar resolusi yang diambil adalah yang paling mampu menyelesaikan masalah antara etnis dan Negara ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah muak akan keputusan gencatan senjata dan perundingan damai karena anggapan bahwa dua hal tersebut tidak akan lagi tercapai mengingat betapa mudahnya PKK meruntuhkan kesepakatan gencatan senjata 2013-2015.

Gelombang desakan ini setidaknya telah cukup menjadi acuan dan pertimbangan bagi Erdogan selaku pemimpin tertinggi untuk memutuskan arah kebijakan yang diambilnya, yakni melalui operasi militer yang resmi digulirkan pada Maret 2017 dan menjadi pembuktian keseriusan Turki untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut tersebut.

2. Kekuatan Militer mendapatkan Suplai

Bukan rahasia lagi bahwa kekuatan militer Turki menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Kekuatan militer Turki tentu dijadikan sebagai acuan acuan yang tepat dalam berbagi kontestasi yang mereka hadapi, salah satunya yang tengah terjadi dengan PKK. Dalam berbagai tekanan yang terus dilakukan PKK dalam bentuk teror berantai, Militer Turki juga mendapat dukungan besar dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan sebagai semangat suportif bagi Turki untuk membantu mereka dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Suplai yang dimaksud disini adalah selain persenjataan, tentara mendapat sokongan lain yakni yang sifatnya sebagai nilai tambah bagi kinerja masing-masing tentara. Bagaimana kemudian usaha yang mereka lakukan dan mereka korbankan untuk negara seharusnya dibayar dalam masa-masa krisis mereka mempertaruhkan nyawa dimedan perang.

Poin-poin yang seharusnya menjadi sokongan pemerintah antara lain pertama adalah transporasi personal kedalam dan keluar, pra atau pasca perang hal ini adalah bentuk akomodatif demi kepentingan bersama, kedua adalah dalam masa operasi mereka bebas akses untuk failias-failitas kenegaraan yang ada di Turki, hal ini sebagai langkah preventif untuk memetakan wilayah

yang memungkinkan jadi wilayah rawan konflik.

Selanjutnya adalah dukungan pengobatan dan kesehatan, di Turki sendiri diberlakukan dengan menggunakan asuransi dimana setiap tentara akan mendapat pelayanan seumur hidup, terlebih jika mereka adalah veteran perang. Hal ini dimungkinkan karena pada saat melakukan kombat, maka akan sangat besar kemungkinan mereka untuk terluka, cacat, bahkan mati.

Terakhir adalah furniture sesuai dengan kapasitas dan kelas dari masing-masing tentara. Hal ini digunakan untuk membantu mobilisasi yang lebih mudah karena umumnya penempatan masing-masing armada disesuaikan dan diusahakan sedekat mungkin dengan titik atau medan perang agar dapat lebih cepat dan lebih sigap dalam merespon konflik.

Oleh karena itu, atas sokongan dan dukungan yang diberikan oleh Turki kepada para tentara baik, sandang, pangan maupun papan sepertinya tidak adalah lagi sedikitpun alasan untuk mengerahkan opsi operasi militer sebagai solusi paling konkret.

3. Memiliki Sistem Persenjataan Mumpuni dan Peralatan Militer yang Cukup Baik

Sesuai dengan tugas dan kapasitas di medan perang, para anggota militer dan penjaga keamanan tentu membutuhkan

peralatan dan persenjataan yang memadai, semakin baik dan berkualitas senjata maka akan semakin besar pula kemungkinan memenangkan pertarungan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Turki dimana terus dilakukan modernisasi dan peremajaan senjata-senjata militer sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin kala perang melawan Partiya Karkeren Kurdistan.

Pemerintah meng-*upgrade* persenjataan dengan mengalokasikan anggaran militer dengan jumlah besar, hal ini bertujuan sebagai efek deterensi bagi lawan dan calon lain selain itu juga bagi atensi seluruh dunia.

Melihat pada aktifitas operasi militer yang membutuhkan tenaga, kekuatan dan pengorbanan besar membuat Turki tidak setengah-setengah dalam memapankan kekuatan militer. Artileri yang dimiliki Turki sangatlah lengkap mulai dari darat laut hingga udara, sekalipun penggunaannya menyesuaikan dengan kondisi dan tipe lawan yang dihadapi.

Pada perang melawan PKK jenis persenjataan yang paling sering digunakan adalah jet tempur, sesuatu yang tidak dimiliki oleh PKK. Hal ini mempermudah mereka menggempur PKK dari udara dan menghasilkan kondisi-kondisi kehancuran yang lebih masif. Kamp-kamp, *shelter* dan goa-goa tempat persembunyian PKK menjadi lokasi utama target serangan.

Untuk itu sangat jelas sekali bagaimana operasi militer dijalankan karena

telah memenuhi syarat baik tentara, senjata dan hal-hal menyangkut artileri lainnya. Hal ini tidak hanya mengindikasikan bahwa Turki siap berperang tetapi punya kemungkinan yang lebih besar untuk memenangkan perang tersebut.

4. Tentara yang siap berperang

Tentara yang siap berperang tentu telah menjadi hal mutlak dan syarat wajib kemiliteran terlepas dari iya atau tidak sebuah operasi militer dijalankan, termasuk dalam kasus Operasi Militer Turki. Faktanya bahkan sebelum operasi militer resmi yang dijalankan pada Maret 2017, Armada Turki telah siap sedia di medan pertempuran dan terlibat dalam berbagai kontak senjata dengan milisi PKK.

Operasi militer bagi para tentara dan armada perang layaknya dijadikan sebagai momentum yang menunjukkan perimbangan eskalasi konflik dengan eskalasi kekuatan dari para militer Turki itu sendiri. Para tentara ditempatkan di 2 tempat khusus selain di pusat-pusat kota dan pusat keramaian, yakni pertama di wilayah zona merah konflik Turki dan PKK dan yang kedua adalah di daerah-daerah perbatasan Negara, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya upaya baik kerjasama terselubung ataupun sebagai aksi preventif mencegah banyaknya PKK yang masuk dan keluar Turki, kekhawatiran akan meluasnya paham dan ideologi kiri yang dibawa oleh kelompok ini menjadi faktor penentu.

B. Faktor Determinan Keputusan Operasi Militer

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai aplikasi konsep tetela menunjukkan penjabaran substansial mengenai keputusan yang diambil Turki untuk menggunakan operasi militer sesuai dengan konsep Operasi Militer itu sendiri yakni menjadi jembatan bagi penggunaan kekuatan militer dengan pencapaian tujuan politik Turki. Turki sebagai subjek yang memiliki kemapanan kekuatan militer mengerahkan tentara dan armadanya untuk mencapai tujuan politik yakni menstabilisasi kembali kondisi akibat kekacauan yang sebelumnya terjadi didalangi oleh Partiya Karkeren Kurdistan.

Selanjutnya kondisi yang terjadi adalah sesuai dengan waktu kapan operasi militer seharusnya dijalankan yakni ketika negara sedang menghadapi kondisi instabil yang merujuk pada destabiliisasi yang dilakukan oleh PKK. Turki juga merefleksikan karakteristik bahwa mobilisasi armada dengan menggunakan kebijakan operasi militer akan mengabaikan sebarapa kompleks hubungan antara Turki dan PKK serta pula mengabaikan tentang kesepakatan atau pencapaian bersama. Dimana pencapaian bersama yakni gencatan senjata yang pernah disepakati sebanyak 2 kali, namun kemudian dilanggar dan diputuskan secara sepihak oleh PKK dengan melanjutkan teror.

Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai faktor determinan proses

pembuatan keputusan luar negeri dari Turki untuk merespon destabilisasi yang dilakukan oleh Partai Karkeren Kurdistan, yakni antara lain :

1. Kondisi Politik Domestik

Kondisi politik domestik Turki menjadi sangat goyah dikala Erdogan tengah memimpin. Hal ini bukan karena disebabkan ketidakmampuannya dalam memimpin, tetapi lebih kepada faktor ekstra yakni tindakan destabilisasi yang dimotori oleh PKK.

Sejak dibatalkannya perjanjian gencatan senjata antara Turki dan PKK, kondisi stabilitas Turki menjadi semakin memburuk. Rangkaian teror yang bersarang di berbagai sudut negara menghasilkan banyak sekali kecaman, ketakutan dan kekhawatiran masyarakat Turki.

Hal terburuk dari situasi politik yang terjadi di Turki sendiri tercermin dari dua masalah mayor yang pertama adalah pecahnya kubu dalam parlemen. Parlemen memiliki peranan penting bukan hanya sebagai badan legislasi tetapi juga sebagai penjaga stabilitas negara. Sayang hal yang tercermin di Turki adalah sebaliknya parlemen terbelah sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh AKP dan HDP yang merupakan representasi dari etnis mayoritas yang bermukim di Turki. AKP sebagai perwakilan dari Turki Anatolia dan HDP sebagai perwakilan dari Kurdi.

Perbedaan pandangan terkait bagaimana seharusnya menyikapi kondisi

Turki pada masa lampau tentang sikap Erdogan kepada Turki merupakan biang masalahnya. Sebagaimana diketahui bahwa Erdogan melakukan upaya komunikasi damai dengan PKK dengan tujuan menciptakn stabilitas. Bagi AKP ini merupakan sebuah langkah yang cerdas yang dilakukan oleh Erdogan karena dapat menjadi penengah dari tingginya tensi antara PKK dan Turki. Sebaliknya HDP justru tidka menyetujui lagkah ini dan menganggap bahwa ini hanya akan melemahkan PKK sebagai sebuah siasat pemerintah yang nantinya berujung pada gagalnya upaya pendirian Negara Sosialis Kurdistan.

Faktor kedua adalah tentang desakan-desakan masyarakat yang ada di Turki. Masyarakat secara komunal terus menerus turun dan melakukan demonstrasi dan aksi meminta agar PKK segera ditumpas habis dari Turki. Mereka dianggap sebagai ancaman terberat yang melumpuhkan seluruh lini kehidupan Turki. Tindakan Erdogan yang persuasif pada masa gencatan senjata dianggap harus lebih diperkuat lagi dan dipertegas lagi, terlebih Erdogan juga merasa dipermainkan oleh PKK atas pembatalang gencatan senjata sepihak yang dilakukan oleh PKK dengan menyerang langsung para petinggi dan anggota PKK.

Atas konsiderasi bahwa tindakan tersebut meracuni kemurnian demokrasi Turki membuat Erdogan dan parlemen yang mayoritas diduduki oleh AKP menyepakati bahwa tindakan tegas melalui operasi militer adalah jalan terbaik, hal ini guna menuntaskan semua permasalahan dan *phobia* masyarakat Turki serta

mengembalikan stabilitas Turki pada kondisi semula yang aman dan damai.

2. Situasi Ekonomi dan Militer

Dikala maraknya destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan yang sedikit banyak merubah wajah Turki dan menurunkan menggetarkan finansial Turki mulai dari berbagai nilai ekspor dan impor khususnya karpet, pertanian dan kunjungan pariwisata secara makro, namun hal tersebut tidak secara sepenuhnya menggoyahkan stabilitas ekonomi Turki.

Turki dikenal sebagai negara yang bukan hanya kaya akan nilai-nilai historis tetapi juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Investasi dan nilai perdagangan di Turki terus tumbuh pesat, terlebih saat terpilihnya Erdogan menjadi Presiden Turki yang dianggap sanga kooperatif untuk mengadakan berbagai perjanjian dan kerjasama baik dengan negara-negara Timur Tengah maupun dengan negara Barat. Sektor-sektor yang baik terus menyuplai kayanya finansial Turki.

Tindakan destabilisasi PKK menjadi pisau bermata dua bagi Turki. Di satu sisi dapat menunjukkan kekuatan fisik militan PKK namun disisi lain seakan memacu semangat nasionalisme masyarakat dan aparat Turki untuk membela dan melindungi negaranya. Hal yang sama ditunjukkan oleh sikap Erdogan sebagai sang pimpinan negara. Melihat kondisi yang sangat genting membuat keputusan untuk menyelesaikan

permasalahan PKK harus benar-benar pada tahapan yang sebaik-baiknya.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi Turki yang walaupun instabil namun tetap kuat mempengaruhi Erdogan untuk mengambil keputusan dilaksanakannya operasi militer ASSD kepada PKK. Turki menganggarkan pendanaan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan operasi militer. Tentu karena kedua sektor ini memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Selain itu dengan militer Turki juga dibekali dengan suplai yang sangat baik oleh pemerintah mulai dari sandang, pangan dan papan. Kemudian diberikan sistem persenjataan dan teknologi yang juga mempunyai untuk siap melakukan operasi militer. Secara statistic Turki memiliki armada militer atau tentara nomor baik ke 8 di dunia karena kelihaiaan mereka dalam strategi dan perang yang sudah dikenal lama saat era Kemal Ataturk dalam era melawan sekutu dan periode modernisasi Turki.

Ekonomi dan Militer yang baik juga menjadi faktor penting yang menjadi pertimbangan Erdogan mengapa kemudian jalan operasi militer dipilih. Operasi militer yang tentunya dilakukan dengan banyak sekali proses dan banyak sekali instrumen yang harus dikorbankan baik oleh Turki dan masyarakat sepertinya tidak pula menjadi masalah selama kondisi stabilitas yang sebelumnya ada di Turki bisa terpenuhi kembali.

3. Konteks Internasional

Turki menjadi pusat perhatian baik bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya kiblat militer Turki, Uni Eropa sebagai “rumah” bagi komunitas Internasional negara Turki serta negara-negara tetangga seperti Irak, Iran dan Suriah. Satu-satunya hal yang dapat menyatukan berbagai negara ini adalah satu perspektif perlawanan terhadap para pemberontak Kurdistan, khususnya Partiya Karkeren Kurdistan.

Gelombang permusuhan yang dipantik oleh PKK membuat mereka bukan hanya mendapat label organisasi terorisme dari berbagai negara di dunia, tetapi lebih dari itu mereka mendapat respon kecaman bahkan penindakan terhadap tindakan brutal yang mereka tujukan pada pemerintah Turki.

Turki sendiri terus membangun kekuatan aliansi dan kerjasama militer khususnya dengan Irak, Iran dan Suriah negara yang menjadi tempat berkembangnya para kaum pemberontak Kurdi. Negara-negar ini melakukan banyak sekali pelatihan militer yang umumnya terpusat di Iran. Langkah ini merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa para militer yang dimiliki Turki sudah siap untuk melakukan perlawanan. Selain itu asas non intervensi dan *sovereignty* juga dipertimbangkan dua kali untuk kasus-kasus terorisme semacam ini. Sebagaimana diketahui bahwa jaringan PKK adalah kelompok organisasi transnasional sehingga mereka melewati berbagai batas negara dan terhubung satu sama lain.

Selain dengan alasan itu, masing-masing militer penjaga diperbatasan juga saling memberikan suplai sebagai usaha saling menjaga dari serangan lanjutan terorisme PKK. PKK yang menjadi momok terus diupayakan dan diberantas oleh berbagai negara karena akan mengganggu keamanan internasional, walaupun sejatinya eksistensi dari kelompok-kelompok semacam ini seakan menjadi sebuah keharusan dalam percaturan politik domestik dan internasional.

Dorongan yang kuat dari dunia internasional untuk mengambil langkah yang cepat baik dari para pemimpin negara dan para pemimpin militer membuat Erdogan semakin bulat sebagai seorang kepala negara mengambil kesimpulan untuk melakukan operasi militer. Efektifitas dan dampak kehancuran adalah alasan yang logis untuk menggunakan pendekatan militer ini dan mengembalikan stabilitas Turki pada kondisi yang seharusnya.

Ketiga faktor diatas adalah faktor determinan yang menjadi bahan pertimbangan dari Erdogan untuk membuat keputusan luar negeri dalam merespon destabilisasi yang dilakukan oleh Partai Karkeren Kurditsan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain sebagai bagian tidak terpisahkan karena pengaruhnya masing-masing. Kondisi politik domestik yang berbicara mengenai syarat administratif baik subjek maupun objek untuk suatu kepentingan negara, kemudian militer dan ekonomi yang merupakan bentuk fisik kekuatan negara yang menjadi syarat kapasitas dan

kualitas suatu negara serta yang terakhir faktor eksternal dengan melihat dan menakar dinamisnya kondisi dunia internasional apakah sesuai untuk menjadi pendorong suatu negara memutuskan suatu keputusan dan apakah kemudian keputusan tersebut akan bekerja dengan baik dalam level-level tersebut baik region, nasional maupun internasional.